

## **Analisis Framing pada Pemberitaan NPWP Diganti NIK dalam Media Massa *Online* *republika.co.id* dan *merdeka.com***

**Septa Dwi Guna<sup>1</sup>, Hendra Setiawan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas  
Singaperbangsa Karawang  
e-mail: septadg@gmail.com

### **Abstrak**

Analisis framing pada pemberitaan NPWP bakal dihapus dan diganti NIK di media massa *online* *republika.co.id* dan *merdeka.com*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami serta menganalisis berita dalam dua media massa *online* *republika.co.id* dan *merdeka.com*. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian analisis framing. Fokus penelitian ini adalah analisis framing dalam pemberitaan NPWP bakal dihapus dan diganti dengan NIK, sehingga untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu yang diangkat oleh media massa *online* *republika.co.id* dan *merdeka.com* adalah informasi serta perbandingan antara kedua media tersebut. Analisis framing menentukan pemaknaan pembaca dalam memahami teks berita yang disajikan oleh media *online*, yaitu *republika.co.id* dan *merdeka.com*. Maka dapat disimpulkan bahwa, media massa *online* *republika.co.id* dan *merdeka.com* lebih menampilkan realitas berita yang ada sesuai dengan faktanya atau tidak disadari rangkaian informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi pola pikir pembaca.

**Kata Kunci:** *Analisis framing, Berita, Media online, NPWP & NIK*

### **Abstract**

Framing analysis on NPWP reports will be deleted and replaced with NIK in mass media *online* *republika.co.id* and *merdeka.com*. This study aims to understand and analyze the news in the two mass media, *online* *republika.co.id* and *merdeka.com*. The method in this study uses a qualitative method with framing analysis research. The focus of this research is the analysis of framing in reporting that the NPWP will be removed and replaced with NIK, so that the data analysis technique used in this research is the framing analysis technique of the Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki model, namely syntax, script, thematic, and rhetorical. The results of this study indicate that the issues raised by the online mass media *republika.co.id* and *merdeka.com* are information and comparisons between the two media. Framing analysis determines the reader's meaning in understanding news texts presented by media *online*, namely *republika.co.id* and *merdeka.com*. So it can be concluded that the mass media *online* *republika.co.id* and *merdeka.com* present the reality of the news according to the facts or not realizing that the series of information conveyed can affect the mindset of readers.

**Keywords :** *Framing analysis, News, Media online, NPWP & NIK*

### **PENDAHULUAN**

Kementerian Dalam Negeri angkat bicara perihal rencana Kementerian Keuangan yang akan menambah fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengakui bahwa NPWP memang nantinya akan digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemerintah memang tengah mendorong era

satu data. Optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya. rencana penambahan fungsi KTP sebagai NPWP dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang kini diubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan adanya peristiwa tersebut beberapa media massa berbondong-bondong membuat berita dengan gaya masing-masing. Media massa menurut KBBI V adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Media massa memiliki berbagai macam jenis, yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Media online saat ini sangat gampang untuk kita lihat atau baca, karena dengan adanya media online saat ini memudahkan orang untuk membaca serta melihat informasi terbaru atau bahkan yang lama, dan untuk membacanya media online ini memudahkan orang bisa untuk membacanya dimana saja dan kapanpun.

Media sebuah berita saat ini menonjolkan beberapa aspek dengan sudut pandang yang berbeda, karena masyarakat mempunyai paradigma tertentu. Dalam isi berita dari suatu media massa tidak jarang menimbulkan opini publik yang beragam, tidak hanya memiliki fakta-fakta yang menarik, namun memiliki opini. Hal ini, karena setiap media massa mempunyai ciri-ciri khas atau karakternya masing-masing dalam menuliskan berita.

Analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Menurut G. J. Aditjondro berpendapat bahwa framing adalah metode penyajian realitas dimana kebenaran suatu realitas tidak diingkari secara total melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan sorotan-sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja dengan menggunakan istilah mempunyai konotasi tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji framing dalam dua media, yaitu Republik.co.id dan Merdeka.com. Oleh karena itu, penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara dari kedua media ini mengonstruksi realitas yang terjadi pada informasi dan membandingkan karakteristik dari dua media dengan judul berita yang memiliki topik sama yaitu NPWP Diganti NIK tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pada penelitian ini berdasarkan pada pendapat Moleong (2007: 4) yang berpendapat bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kata-kata baik tertulis maupun lisan dari tindakan yang bisa dilihat. Penelitian ini menggunakan deskripsi suatu peristiwa yang ada didalam berita dengan menggunakan analisis framing oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Selain itu, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif noninteraktif dengan pendekatan deskriptif yang berorientasi pada analisis isi. Karena, isi dari penelitian ini yaitu mengenai analisis framing pada media online Republika.co.id dan Merdeka.com mengenai NPWP Bakal Dihapus dan Diganti NIK. Pemberitaan ini diunduh dari portal berita Republika.co.id edisi 05 Oktober 2021 dan Merdeka.com edisi 06 Oktober 2021.

Dalam pendekatan ini perangkat framing dibagi menjadi 4 struktur besar (Eriyanto:2002:293-306), yaitu sebagai berikut:

### **1. Struktur Sintaksis**

Struktur Sintaksis dapat diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, (pertanyaan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa) menjadi sebuah berita. Elemen sintaksis memberi petunjuk yang berguna tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak kemana berita tersebut akan dibawa. Bentuk sintaksis yang populer adalah piramida terbalik yang dimulai dengan judul *headline*, *lead*, episode, latar dan penutup. Dalam bentuk ini bagian yang diatas ditampilkan lebih penting dibanding bagian bawahnya, dan dimulai dengan menyajikan hal yang terpenting ke hal yang tidak penting.

## 2. Struktur Skrip

Struktur Skrip melihat bagaimana wartawan mengemas suatu peristiwa. Laporan berita sering disusun sebagai suatu cerits. Hal ini disebabkan 2 hal yaitu pertama untuk menunjukkan hubungan antara peristiwa satu dengan sebelumnya, kedua untuk penghubung teks yang tertulis dengan lingkungan komunal pembaca. Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah 5W+1H, Who, What, When, Where, Why dan How.

## 3. Struktur Tematik

Struktur Tematik yaitu cara pandang wartawan atas suatu peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil dan fakta ditulis dalam suatu berita.

## 4. Struktur Retoris

Struktur Retoris berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu yang digambarkan dari pilihan gaya atau kata. Wartawan menggunakan perangkat retorik untuk membuat citra, meningkatkan penonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Terdapat beberapa elemen dalam struktur retorik diantaranya leksikon, pemilihan dan pemakaian kata untuk menandai atau menggambarkan suatu peristiwa. Bahkan tidak hanya melalui kata penekanan dapat dilakukan melalui grafis berupa gambar, tabel, foto, dan lain sebagainya.

Subjek dalam penelitian ini adalah 2 berita pada 2 media *online* yaitu, berita dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan berita dari [Merdeka.com](http://Merdeka.com) mengenai pemberitaan isu NPWP yang akan digantikan dengan NIK. Pemberitaan akan diteliti dengan menggunakan model analisis framing, model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, peneliti mendapatkan berita dari media massa *online* yang faktual, terpercaya, dan valid, agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil hanya 2 berita dari 2 media berita *online*, yaitu [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Merdeka.com](http://Merdeka.com). Dari beberapa berita pilihan tersebut peneliti menilai sudah dapat mewakili mengenai bagaimana framing yang dilakukan oleh kedua media massa *online* tersebut. Kemudian dari 2 berita tersebut, di baca, di cermati, dan di analisis mengenai pemberitaan NPWP Bakal dihapus dan Diganti NIK.

Penelitian ini bertujuan melihat pbingkain media *online* dalam pemberitaan NPWP digantikan NIK sehingga lebih tepat menggunakan model analisis framing Zhongdang Pan dan M. Kosicki karena model ini merupakan model yang paling populer dan banyak dipakai serta Pan dan Kosicki menjabarkan sebuah model yang sangat detail dalam melihat sebuah pbingkain berita. Analisis framing berfungsi sebagai perangkat framing karena dapat dikenal dan dialami, dapat dikonseptualisasikan ke dalam elemen yang konkrit dalam suatu wacana yang dapat disusun dan dimanipulasi oleh pembuat berita, dan dapat dikomunikasikan dalam kesadaran komunikasi.

**Tabel 1. Data Berita yang akan Diteliti**

Republika.co.id		Merdeka.com	
Waktu Terbit	Judul Terbit	Waktu Terbit	Judul Terbit
Selasa, 05 Oktober 2021	NPWP Bakal Dihapus dan Diganti NIK	Rabu, 06 Oktober 2021	Dirjen Dukcapil: NPWP akan Dihapus Digantikan NIK

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dalam penelitian ini untuk mengetahui suatu framing dalam pemberitaan media *Republika.co.id* dan *Merdeka.com*.

### **Analisis Framing Berita NPWP Bakal Dihapus dan Diganti NIK pada media massa *Republika.co.id***

#### 1. Struktur Sintaksis

Berdasarkan hasil analisis struktur sintaksis pada media *online* *Republika.co.id* menggunakan struktur piramida terbalik, dilihat dari struktur yang ada yaitu, *lead*, *body*, dan *leg*. *Lead* terletak pada paragraf pertama yang berisi informasi utama tentang “Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, pembangunan era satu data di Indonesia sudah dimulai sejak 2013 lalu. Kemudian di paragraph yang sama juga dijelaskan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi satu-satunya nomor unik yang dimiliki warga negara sebagai identitasnya, termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk diganti dengan NIK.” Hal tersebut dapat menunjukkan gebrakan baru yang dilakukan oleh Dukcapil Kemendagri agar semua data dapat terintegrasi dalam satu barisan angka, yaitu NIK. Disamping itu pun Zudan Arif menjelaskan “Hal tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kemendagri berperan sebagai integrator data.”

[1] LEAD *REPUBLIKA.CO.ID*, *JAKARTA (WHERE)* -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh (*WHO*), mengatakan, pembangunan era satu data di Indonesia sudah dimulai sejak 2013 lalu (*WHY*). Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi satu-satunya nomor unik yang dimiliki warga negara sebagai identitasnya, termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk diganti dengan NIK (*WHAT*). “Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK,”(*HOW*) ujar Zudan dalam siaran persnya, Senin (4/10) (*WHEN*).

[2] *BODY* Dia menyebutkan, optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya, mulai dari provider jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, kesehatan, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi. Bahkan, data daftar pencarian orang (DPO) sudah terintegrasi dengan data kependudukan. “Data DPO juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil karena Polri rutin menggunakan hak akses data kependudukan melalui face recognition dan pencocokan biometrik untuk menangkap berbagai pelaku kejahatan seperti terorisme,” kata Zudan. Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kemendagri berperan sebagai integrator data. Pada 2013, Kemendagri telah melakukan kerja sama pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan dengan 10 lembaga pengguna.

[3] *LEG* Sejak saat itu, jumlah lembaga pengguna hak akses verifikasi data Dukcapil terus meningkat pesat. Pada 2017, jumlah pengguna hak akses verifikasi data kependudukan Dukcapil meningkat menjadi 716 lembaga. Hingga per September 2021 sudah ada 3.904 lembaga yang menjadi pengguna hak akses verifikasi data kependudukan, baik lembaga pusat maupun daerah. Sejumlah kementerian/lembaga mulai mencocokkan datanya dengan Dukcapil sehingga perencanaan/pembangunan hingga pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran. “Integrasi data penerima bansos, misalnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan pencocokan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan NIK yang diampu Dukcapil. Bila ditemukan ada data yang tidak cocok NIK-nya, maka data tersebut dikeluarkan dari DTKS,” kata Zudan.

#### 2. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip yang ada pada teks berita *Republika.co.id*, berita ini menggunakan ujaran dengan judul berita NPWP Bakal Dihapus dan Diganti NIK yang diinformasikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri, sudah melengkapi unsur 5W+1H *Who, What, When, Where, Why* dan *How* adanya hal-hal tersebut didalam isi berita sudah lengkap dalam keseluruhan teks berita.

Bagian [1 *lead*] merupakan bagian penting yang memuat 5W + 1H. Bagian [2 *body*] merupakan informasi tambahan yang menjelaskan bagian [1]. Sedangkan bagian [3 *leg*] merupakan informasi tambahan yang kurang penting. Stuktur skrip 5W + 1 H didapatkan dalam kata atau kalimat dalam berita sebagai berikut: *Where* -> Jakarta, *Who* -> Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, *Why* -> pembangunan era satu data di Indonesia sudah dimulai sejak 2013 lalu, *What* dikutip pada -> Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi satu-satunya nomor unik yang dimiliki warga negara sebagai identitasnya, termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk diganti dengan NIK, *When* -> Senin (4/10), *How* dikutip dalam -> Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK.

#### [1] LEAD

Merdeka.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh (WHO) menjelaskan Ditjen Pajak sepakat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dihilangkan. (WHAT) NPWP akan terintegrasi dan digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). (HOW)

"Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK," (WHY) kata Zudan (WHO) dalam keterangan pers (WHERE) , Rabu (6/10). (WHEN)

#### [2] BODY

Dia menjelaskan optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya. Terdiri dari provider jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, kesehatan, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi.

"Data DPO juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil karena Polri rutin menggunakan hak akses data kependudukan melalui face recognition dan pencocokan biometrik untuk menangkap berbagai pelaku kejahatan seperti terorisme," bebarnya.

#### [3] LEG

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan peraturan tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik. Aturan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2021 berisi 13 pasal dan ditekan Presiden Jokowi pada 9 September lalu.

"Menimbang bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik guna melayani setiap warga negara dan penduduk, dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, perlu menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik," bunyi perpres tersebut dikutip merdeka.com, Rabu (29/9). (mdk/bal)

### 3. Struktur Tematik

Berita ini ditulis berdasarkan pernyataan langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, dengan menjelaskan akan melakukan integrasi NPWP dihapus yang kemudian digantikan dengan NIK. Hal tersebut pun sudah mendapatkan kesepakatan oleh Ditjen Pajak. Ungkapan tersebut disampaikan oleh Zudan Arif Fakrulloh pada siaran persnya.

Dia menyebutkan, optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya, mulai dari *provider* jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, kesehatan, penegakan hukum dan

pengecahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi. Bahkan, data daftar pencarian orang (DPO) sudah terintegrasi dengan data kependudukan.

#### 4. Struktur Retoris

Retoris ini dalam pemilihan kata media massa [Republika.co.id](http://Republika.co.id) lebih banyak menggunakan kutipan pernyataan ujaran dari narasumber tersebut. Cara wartawan menekankan fakta yang terlihat pada bagian paragraf "Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kemendagri berperan sebagai integrator data. Pada 2013, Kemendagri telah melakukan kerja sama pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan dengan 10 lembaga pengguna."

### **Analisis Framing Berita Dirjen Dukcapil: NPWP akan Dihapus Digantikan NIK pada media massa Merdeka.com**

#### 1. Struktur Sintaksis

Struktur sintaksis dari media online [detik.com](http://detik.com) menggunakan struktur piramida terbalik, dilihat dari *lead* yang disampaikan dengan membahas informasi utama. Sang wartawan Menyusun informasi utama di awal paragraph yang menjelaskan pernyataan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengenai Ditjen Pajak telah sepakat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dihilangkan. NPWP akan terintegrasi dan digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penambahan informasi ke masyarakat pun terdapat pada kutipan berita "Diketahui Presiden Joko Widodo menekan peraturan tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik.

#### 2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip yang ada pada teks berita [Merdeka.com](http://Merdeka.com) ini menggunakan ujaran dengan judul berita Dirjen Dukcapil: NPWP akan Dihapus Digantikan NIK, yang diinformasikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sudah melengkapi unsur 5W+1H *Who, What, When, Where, Why* dan *How* adanya hal-hal tersebut didalam isi berita sudah lengkap dalam keseluruhan teks berita.

Bagian [1 *lead*] merupakan bagian penting yang memuat 5W + 1H. Bagian [2 *body*] merupakan informasi tambahan yang menjelaskan bagian [1]. Sedangkan bagian [3 *leg*] merupakan informasi tambahan yang kurang penting.

5W + 1 H didapatkan dalam kata atau kalimat dalam berita sebagai berikut: *Who* -> Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, *What* -> Ditjen Pajak sepakat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dihilangkan, *How* -> NPWP akan terintegrasi dan digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *Why* -> optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK, *Who* -> Zudan, *Where* -> dalam keterangan Pers, *When* -> Rabu (6/10).

#### 3. Struktur Tematik

Dalam teks berita berisi beberapa paragraf yang memiliki fakta diikuti dengan kutipan pernyataan dari narasumber untuk mendukung teks berita. Dengan teman pada berita ini NPWP akan terintegrasi dan digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seperti pada di paragraf pertama. Selain itu, dilihat dari pengutipannya, penulis mengambil beberapa fakta dari media [merdeka.com](http://merdeka.com), "Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK," kata Zudan dalam keterangan pers, Rabu (6/10).

#### 4. Struktur Retoris

Retoris ini dalam pemilihan kata media massa [merdeka.com](http://merdeka.com) lebih mengutip dari ujarannya, banyak sekali ujaran yang digunakan. Cara wartawan dalam pemberitaan ini menekankan fakta yang terlihat pada bagian Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo ([Jokowi](http://Jokowi)) menekan peraturan tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik. Aturan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2021 berisi 13 pasal dan ditekan Presiden Jokowi pada 9 September lalu. Kemudian, didalam penulisan tersebut adanya kata “bebernya” yang merupakan ujarannya, bahkan dalam kata seperti itu mungkin tidak semua orang bisa memahami arti dalam kata tersebut. Selanjutnya, merdeka.com menempelkan foto setelah judul berita dan setelah foto adanya nama penulis.

### **Pembahasan Framing Pemberitaan Republika.co.id**

Berdasarkan hasil analisis diatas dari media massa Republika.co.id mengenai bagaimana media tersebut memaknai fakta yang terjadi terkait NPWP Bakal Dihapus dan Diganti NIK. Penulis berita memaparkan dari hasil penjelasan konferensi pers oleh Bapak Zudan Arif Fakrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri). Sedangkan dari segi bahasanya pemberitaan media ini berusaha memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dengan pemakaian bahasa yang informatif sesuai dengan keterangan narasumber.

Hasil dari analisis framing pemberitaan pada media massa Republika.co.id, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi satu-satunya nomor unik yang dimiliki warga negara sebagai identitasnya, termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digantikan dengan NIK. Dengan adanya berita tersebut, dapat membuat perhatian masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan, dikarenakan data DPO juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil.

### **Pembahasan Framing Pemberitaan Merdeka.com**

Hasil analisis framing dari media Merdeka.com mengenai Dirjen Dukcapil: NPWP Dihapus Digantikan NIK, yaitu hampir sama dengan media Republika.co.id penulisan rangkaian beritanya berdasarkan dari hasil keterangan Bapak Zudan Arif Fakrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) dalam konferensi pers. Dari media Merdeka.com dapat terlihat tidak adanya keterpihakan, dikarenakan pemberitannya dikemukakan tanpa adanya dilebih-lebihkan dan sesuai fakta yang disampaikan oleh narasumber.

Sedikit perbedaannya, yaitu melalui informasi yang diterangkan dari kutipan berita ini “Diketahui Presiden Joko Widodo menekan peraturan tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik.”. Sehingga akhirnya media massa Merdeka.com pun memiliki peran dalam segi pembahasaannya yang informatif, namun pemberitaannya sangat ringkas.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis dari kedua media *online* Republika.co.id dan Merdeka.com bahwa isi dari berita dari media tersebut hampir sama memiliki penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga media tersebut memiliki berita yang informatif. Hal itu terlihat pada struktur-struktur yang ada. Perbedaannya, yaitu terletak pada isi beritanya yang dibuat media Republika.co.id lebih jelas dan mudah dipahami, sedangkan pada berita Merdeka.com penyusunannya lebih ringkas. Namun, hal tersebut menjadi menarik karena pembaca ingin mengetahui isi berita tersebut apa yang disampaikan di dalam berita. Lalu, untuk skrip Republika.com dan Merdeka.com sama-sama mengungkap pernyataan dari Bapak Zudan Arif Fakrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) melalui konferensi pers. Republika menyusun kalimat dengan ketentuannya dan Merdeka.com pun sama. Kemudian, untuk struktur retorik kedua media tersebut menggunakan diksi yang sesuai dengan peristiwa NPWP akan Digantikan NIK. Dari uraian berita diatas terbukti bahwa Republika.com mengemas berita dengan kompleks dan jelas dari setiap isi paragrafnya dan

untuk media Merdeka.com lebih membahas secara singkat saja, namun keduanya dapat membuat pembaca memahami isi berita dan mendapatkan informasi dari berita tersebut.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari artikel ilmiah atau jurnal ini dengan baik serta terselesaikannya tidak terlepas dari bantuan dan keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Hendra Setiawan, S.S., M.Pd. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Bingkai Berita di FKIP Unsika
2. Rekan-rekan mahasiswa kelas 7B peminatan Jurnalistik FKIP Unsika
3. Semua pihak yang membantu namun tidak dapat dituliskan namanya satu-persatu.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan mampu dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anzari, P. P., & Fariza, N. P. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Penangkapan Juliari Batubara dalam Korupsi Dana Bansos Covid-19 pada Kompas.com. *Jurnal Kajian Media*, 39-49.
- Badan Bahasa Kemdikbud. (2020). *KBBI versi V*. Diambil kembali dari kemdikbud.go.id: [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id)
- Boer, K. M., Pratiwi, M. R., & Muna, N. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 85-104.
- Cabucci, M. O., & Maulina, P. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Kebakaran Hutan dan Lahan PT. Agro Sinergi Nusantara Pada Media Online Lokal dan Nasional. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 205-216.
- Handariastuti, R., Achmad, Z. A., & Bramayudha, A. (2020). Analisis Framing Berita Pemberhentian PSBB Surabaya Raya di Media Online Kompas.com dan Suarasurabaya.net. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 157-173.
- Harnia, N. T., & Meliasanti, F. (2021). Analisis Framing Berita Perundungan pada Media Online Detik.com dan Tribunnews.com sebagai Bahan Ajar Teks Berita di SMP. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3145-3153.
- Lexy, M. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mayasari, S. (2017). Konstruksi Media Terhadap Berita Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing Pada Surat Kabar Kompas dan Republik. *Jurnal Komunikasi*, 8-17.
- Merdeka.com. (2021, Oktober 06). *Dirjen Dukcapil: NPWP akan Dihapus Digantikan NIK*. Diambil kembali dari [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com): <https://www.merdeka.com/peristiwa/dirjen-dukcapil-npwp-akan-dihapus-digantikan-nik.html>
- Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 di Harian Kompas.com dan Jawapos.com. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 11-24.
- Prasetyo, N., Suciati, T. N., & Sudarmanto, B. (2020). Framing Pemberitaan Sidang Gugatan Kasus Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta. *Jurnal Daring Mahasiswa Komunikasi*, 1, 1-11.
- R.S, L. J. (2013). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Di Harian Media Indonesia dan Koran Sindo. *Jurnal E-Komunikasi*, 84-92.
- Republika.co.id. (2021, Oktober 05). *NPWP Bakal Dihapus dan Diganti NIK*. Diambil kembali dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id): <https://www.republika.co.id/berita/r0h76b487/npwp-bakal-dihapus-dan-diganti-nik>
- Sucipta, J. A., & Kurniawan, R. C. (2021, Juni). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik.com dan Kompas.com Mengenai Kebijakan Kaltim Silent. *An-Nida*, 13, 38-49.



- Sukri, A., & Yesicha, C. (2017). Analisis Framing Berita Penangkapan Gubernur Riau Annas Maamun di Surat Kabar Riau Pos dan Tribun Pekanbaru. *Jurnal Komunikasi Global*, 220-238.
- Yusniar, E., & Retnasary, M. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Menkumham Yasonna Laoly Tentang Kebijakan Pembebasan Narapidana Ditengah Wabah Covid-19 (Media Online detik.com dan kompas.com). *Jurnal Politikom Indonesiana*, 1-17.
- Zulaikha, N. H. (2019). Analisis Framing Pemberitaan Pilgub Jawa Timur 2018 pada Situs Berita Daring Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 91-110.